

# Kemunculan Jokowi di Pentas Politik Nasional

**Ali Noer Zaman**

alinoerzaman@umj.ac.id

Prodi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jakarta

## **ABSTRAK**

Joko Widodo atau yang dikenal dengan Jokowi adalah presiden Republik Indonesia sejak tahun 2014. Ia merupakan presiden yang berasal dari non elite di Indonesia. Kemunculannya di pentas politik nasional merupakan hasil dari perubahan politik yang memungkinkan pemilihan presiden secara langsung. Tulisan ini membahas perubahan Jokowi dari tokoh politik menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia dan tantangan-tantangan yang dihadapinya terutama di periode awal menjabat sebagai presiden (2014-2019). Rujukan tulisan kebanyakan berasal dari sumber online. Data kemudian dianalisa secara filosofis.

Kata Kunci: Presiden, Jokowi, Islam, Pemilu Presiden

## **PENDAHULUAN**

Kehadiran Joko Widodo alias Jokowi dalam perpolitikan nasional merupa-

kan sebuah fenomena politik yang menarik untuk diamati. Menurut tradisi yang berlangsung selama ini, tokoh-tokoh dan para politisi nasional biasanya lahir dari kalangan elite yang sebelumnya terlibat dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia dan kemudian menduduki posisi penting di pemerintahan. Mereka bisa berasal dari kalangan sipil maupun militer. Hal ini setidaknya kita bisa amati pada beberapa pejabat pemerintahan sipil dan militer yang ada saat ini di era Reformasi.

Hingga pemilu 2019, Jokowi adalah satu-satunya presiden Indonesia yang berasal dari rakyat jelata. Sebelum dilantik sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi adalah Gubernur DKI yang menjabat selama kurang lebih dua tahun (2012-2014), dan Wali Kota Solo (2005-2012). Pekerjaan utama Jokowi sebelum terjun

ke politik adalah pengusaha mebel. Jokowi bisa dikatakan sebagai politisi yang tidak berasal dari aktivis dan tanpa pengalaman organisasi yang mencolok.

Tulisan ini akan membahas se-penggal perjalanan politik Jokowi dari pemimpin daerah hingga menjadi tokoh nasional, dan tantangan-tantangan politik yang dihadapinya.

## PEMBAHASAN

Kendaraan politik Jokowi ketika maju sebagai calon walikota Solo pada tahun 2005 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang didukung oleh sejumlah partai koalisi. Saat menjabat sebagai walikota, Jokowi dikenal masyarakat sebagai pejabat yang senang dengan blusukan, yakni menemui langsung masyarakat hingga daerah terpencil, termasuk pasar, guna mendapatkan aspirasi mereka. Jokowi juga dikenal sosok yang sabar dalam bernegosiasi untuk memindahkan pedang kaki lima, yang sering menempati wilayah illegal di Solo. Dalam upaya membantu taraf kehidupan rakyat, Jokowi memperkenalkan Kartu Pinter, Kartu Sehat dan Kartu Miskin. Melalui program-program yang merakyat, Jokowi berhasil terpilih untuk periode kedua sebagai walikota Solo (2010).

Salah satu program yang mencuri perhatian publik, karena dipublikasikan secara besar-besaran melalui

media massa dan media massa –cetak dan elektronik– adalah mobil ESEMKA, sebuah produk lokal hasil karya anak SMA di Solo. Meskipun mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, Jokowi berani menggunakan mobil buatan anak SMA ini untuk sebagai mobil dinas. Pada saat itu Jokowi ingin menjadikan mobil ESEMKA sebagai cikal bakal mobil nasional, sebuah kampanye yang berhasil menarik perhatian public Indonesia, yang memang sejak lama menginginkan agar Indonesia memiliki mobil merek nasional.

Satu peristiwa yang turut menasionalkan nama Jokowi adalah perseteruannya dengan gubernur Jawa Tengah saat itu, Bibit Waluyo. Pada tahun 2011, Jokowi menentang pembangunan mall di lahan bangunan kuno bekas Pabrik Es Saripetojo yang berlokasi di Purwosari, Laweyan, yang telah disetujui oleh Bibit Waluyo. Gubernur beranggapan bahwa tanah tersebut adalah asset milik pemerintah provinsi Jawa Tengah, sehingga ia berhak mengeluarkan ijin pembangunan. Di sisi lain, Jokowi berpendapat bahwa pembangunan mal tersebut akan merugikan puluhan pedagang yang telah mencari penghasilan di kawasan tersebut. Akibat perseteruan tersebut, 27 Juni 2011, Gubernur Bibit Waluyo menyebut Jokowi sebagai walikota yang bodoh. “Wali kota Solo [Jokowi] itu bodoh, kebijakan Gubernur kok

ditentang. Sekali lagi saya tanya, Solo itu masuk wilayah mana? Siapa yang mau membangun?"<sup>1</sup> Sebagai responnya, maka pada tanggal 27 Juni 2011, Jokowi beralasan bahwa di Solo telah terdapat banyak mal, sehingga jumlahnya perlu dibatasi agar tidak menggeser keberadaan pasar tradisional. Saat disebut bodoh oleh gubernur Bibit Waluyo, Jokowi, dengan menggunakan gaya komunikasi Jawa yang merendahkan diri, hanya menerima saja dan tidak berusaha meresponnya. "Iya, saya memang masih bodoh. Masih harus banyak belajar ke banyak orang. Dibilang begitu ya enggak apa-apa,"<sup>2</sup>

Saat akan berlangsung pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012, Jokowi dihadirkan sebagai salah satu kandidat. Keberhasilannya mengelola kota Solo dan pendekatannya yang dianggap lebih humanis, telah mampu menarik simpati partai politik dan tokoh politik nasional. Dalam pandangan publik saat itu, Jakarta membutuhkan tokoh reformis yang betul-betul mampu memberikan terobosan terhadap problem Jakarta yang telah akut seperti kemacetan, banjir, perumahan kumuh, dan birokrasi yang rumit-bukan pelayanan satu pintu. Gubernur inkumben saat itu, Fauzi Bowo, dinilai telah

menjadi bagian kekuatan lama yang gagal melakukan perubahan di Jakarta. Tentu, pencalonan Jokowi sebagai calon gubernur DKI tahun 2012 tidaklah berjalan mulus. Elite PDI-P, seperti Ketua Umum Megawati Sukarno Putri, Pramono Anung, dan Tjahjo Kumolo, pada awalnya enggan untuk memberi dukungan pada mantan walikota Solo ini, karena ia lebih condong pada gubernur petahana, Fauzi Bowo. Bahkan, adik Prabowo, Hashim Joyohadikusumo, menyatakan bahwa yang memboyong Jokowi ke Jakarta adalah Prabowo Subianto. Alasannya, Jokowi tidak memiliki dana untuk membiayai kampanye Pilgub DKI. Maka, dalam kerangka meyakinkan para elite PDI-P, Hashim mengklaim bahwa dirinyalah yang membiayai kampanye tersebut.<sup>3</sup> Jokowi pun mengakui peran Prabowo dalam menjadikan dirinya sebagai gubernur DKI Jakarta.<sup>4</sup>

Dalam pemilu DKI 2012, Jokowi maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Basuki Tjahaya Perunama (Ahok) yang didukung oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P)

1 <https://tirto.id/sejarah-polemik-jokowi-vs-bibit-waluyo-yang-diklaim-dukung-prabowo-dgoX>. Diakses 7 Agustus 2019.

2 Ibid.

3 Hashim Sebut Megawati Sempat Ogah Sama Jokowi buat Pilgub DKI, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190122080050-32-362692/hashim-sebut-megawati-semat-ogah-sama-jokowi-buat-pilgub-dki>, diakses 13 Agustus 2019.

4 "Jokowi Akui Prabowo Berperan Menjadikannya Gubernur DKI, tetapi..", <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/27/1918260/Jokowi.Akui.Prabowo.Berperan.Menjadikannya.Gubernur.DKI.tetapi..>

dan Gerindra. Di putaran pertama, pasangan tersebut berhadapan dengan kandidat lain seperti Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (didukung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Matahari Bangsa), Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rachbini (Partai Keadilan Sejahtera), Alex Nurdin dan Nono Sampono (Golongan Karya dan Non Partai), Hendarji Supandji dan Ahmad Riza Patria (Independen dan Gerindra), Faisal Batubara dan Biem Triani Benjamin (Non-Partai).

Pada awalnya, pasangan Jokowi-Ahok dianggap sebagai pasangan yang tak diprediksi menang (*under-dog*), karena keduanya merupakan pendatang baru, dan berasal dari daerah. Lingkaran Survei Indonesia menyatakan bahwa apakah pemilu gubernur dilakukan satu atau dua kali putaran, yang akan menang adalah pasangan Foke-Nara di atas 50 persen. Hal ini dikarenakan, hingga 14 hari menjelang pencoblosan pada pasangan Foke-Nara didukung 43,7 persen, diikuti pasangan Jokowi-Ahok yang hanya 14,4 persen. Sedangkan Lembaga Survei Indonesia dan Tempo menyatakan bahwa pertarungan akan berlangsung ketat antara pasangan Foke-Nara dan Jokowi-Ahok, karena yang pertama diprediksi memperoleh 44,7 persen suara, se-

mentara yang kedua 45,6 persen, dan mereka yang belum menentukan pilihan sebanyak 9,7 persen, tetapi keduanya memprediksi kemenangan Foke-Nara. Sementara oleh Jak TV (Jakarta Televisi) menunjukkan bahwa pasangan Foke-Nara akan menang dengan 53,78 persen, sementara Jokowi-Ahok hanya memperoleh 29,61 persen. Dalam putaran kedua Pemilu Gubernur DKI 2012, Jokowi-Ahok mendapatkan 2.472.130 (53,82%) dan berhasil mengalahkan pasangan Bowo-Nachrowi Ramli yang memperoleh suara 2.120.815 (46,18%).

Dukungan partai politik yang lebih banyak kepada pasangan Foke-Nara ternyata tidak mampu memberikan kemenangan. Hal ini menunjukkan bahwa mesin partai politik tidak bergerak untuk memenangkan pasangannya, atau mungkin saja terjadi perbedaan pilihan politik antara elite partai dengan massa pendukungnya. Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan kemenangan pasangan Jokowi-Ahok. Dari segi komunikasi politik, pasangan Foke-Nara, yang masing-masing memiliki latar belakang sebagai birokrat sipil dan militer, terbiasa dengan komunikasi satu arah (*topdown communication*). Di sisi lain, Ahok dan Jokowi cenderung berkomunikasi secara interaktif, dengan lebih banyak mendengar masukan dari audiens. Pesan komunikasi Jokowi

juga sederhana dan mudah dicerna masyarakat. Jika dikaitkan dengan usia konstituen, masing-masing gaya komunikasi tersebut sesuai dengan kategori umur konstituen, yang bisa dibagi ke dalam empat kategori.

1. Usia 55-75 tahun, usia bagi kelompok kerja konservatif dan loyal pada organisasi, yang jumlahnya sekitar 1.044.352 suara (15%).
2. Usia 40-54 tahun, mewakili kelompok kerja eksistensial yang berjumlah 1.879.833 (27%)
3. Usia 30-39 termasuk dalam kelompok kerja Pragmatis yang berjumlah 1.183.599 suara (17%)
4. Generasi X, yang berjumlah 2.854.564 (41persen).

Maka didasarkan pada karakter masing-masing kelompok usia tersebut, usia 55-75 tahun dan 40-54 memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memilih pasangan Foke-Nara, yang memiliki gaya komunikasi paternalistic dan birokratis, sementara Jokowi-Ahok diprediksi mendapat banyak dukungan dari usia 30-39 tahun dan generasi X dengan gaya komunikasi yang lebih egaliter.<sup>5</sup>

Sementara itu, Dharma Tintri Ediraras dkk, dengan mendasarkan diri pada teori marketing politik

Baines et.al (2002) and Nursal (2004) menjelaskan tiga pendekatan untuk mendapatkan dukungan politik. Pertama *Push Marketing*, kandidat atau partai politik mendapatkan dukungan dari stimulus yang diberikan secara langsung kepada pemilih. Dalam hal ini Jokowi-Ahok berani berkampanye dengan langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat. Jokowi-Ahok mendapatkan dukungan dari sekitar 6500 relawan dengan 89 kantor di Jakarta. Antara bulan Agustus hingga September 2012, 1.1 juta rumah dan 580,000 warga terkontak oleh telepon dan ICT, guna mendukung Jokowi-Ahok. Partai PDIP dan Gerindra juga berhasil membuat kampanye mereka dipadati massa. Di bulan terakhir kampanye, mereka berhasil mengumpulkan sekitar 400 ribu orang. Kedua, *Pass Marketing*, di mana memasarkan produk-produk melalui orang atau kelompok orang yang berpengaruh. Dalam hal ini, pasangan Jokowi-Ahok didukung oleh kalangan akademisi, artis, dan sejumlah tokoh public, termasuk keluarga presiden pertama dan kedua, serta jaringan media massa dan raksasa televisi, dan tentu saja *swing voter* dari partai lain yang pindah pilihan pada pemilu tahap kedua. Ketiga, *Pull Marketing*, memasarkan politik melalui media massa yang memfokuskan pada citra atau citra dari produk politik.

5 Eko Harry Susanto, "Jokowi's Political Communication in Jakarta Governor Election to Win Age-Based Voters," *Mediterranean Journal of Social Sciences* · January 2017, hlm. 317.

Kemenangan Jokowi-Ahok difasilitasi oleh di antaranya penggunaan internet melalui Blackbery, media social dan Youtube, guna merekrut donator dan volutir.<sup>6</sup>

Kemenangan Jokowi juga bisa dianalisa dari pendekatan populisme. Populisme menurut Panizza adalah "sebuah wacana anti status quo yang menyederhanakan ruang politik dengan secara simbolik membagi masyarakat antara "rakyat" (sebagai *underdog*) dengan "lainnya" (*anti-status quo discourse that simplifies the political space by symbolically dividing society between 'the people' (as the underdogs) and its 'other'*"). Maka, Abdul Hamid mengidentifikasi empat faktor populisme yang memungkinkan Jokowi merebut kursi gubernur DKI, yakni (1) kehadiran Jokowi sebagai terobosan social dan kemampuan pemerintahan yang menurun; (2) tradisi politik yang korup dan kering serta citra buruk dari partai politik; (3) adanya perubahan social; dan (4) munculnya bentuk-bentuk perwakilan politik di luar institusi politik tradisional.<sup>7</sup>

Dalam pilgub Gubernur DKI 2012, salah satu hal yang menarik untuk ditelaah adalah isu-isu yang muncul

selama kampanye. Di samping para kandidat beradu argument tentang program-program unggulan, yang tak boleh dilupakan adalah persoalan-persoalan SARA (Suku, Ras, Agama, dan Golongan) sebagai alat kampanye hitam. Hal tersebut terjadi meskipun terjadi pengkaburan antara partai-partai berbasis agama dan partai-partai berbasis bangsa. Dalam pemilu DKI pasangan Foke-Nara berusaha mencitrakan diri sebagai muslim yang taat dengan menggunakan symbol-simbol agama dan sekaligus menguatkan identitas etniknya sebagai orang Betawi. Di sisi lain, Jokowi-Ahok juga menggunakan symbol-simbol agama meskipun tidak terlalu provokatif. Hal itu misalnya dilakukan dengan mendekati dan mengunjungi organisasi Muslim yang besar seperti Nahdhatul Ulama dan para pemimpin majelis dzikir. Ia juga mengandeng Ridwan Saidi, seorang tokoh Betawi, untuk memperkuat barisan tim kampanyenya.<sup>8</sup>

Langkah-langkah politik Jokowi di bulan-bulan awal menjabat sebagai gubernur senantiasa menarik publik. Pemberitaannya oleh media massa dan media sosial selalu diikuti oleh pembaca. Maka di masa itu, banyak buku dan artikel yang membahas tentang Jokowi. Apalagi, ia didukung oleh wakil gubernur yang tak biasanya,

6 Dharma Tintri Ediraras, "Political Marketing Strategy of Jakarta Governor Election in The 2012s," dalam *Procedia -Social and Behavioral Sciences* 00 (2012) 000-000.

7 Hamid, Abdul (2014), *Jokowi's Populism in the 2012 Jakarta Gubernatorial Election*, in: *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1, 85-109.

8 Miichi, Ken, *The Role of Religion and Ethnicity in Jakarta's 2012 Gubernatorial Election*, in *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 2014, 33, 1, 55-83.

yakni Basuki Tjahaya Purnama, alias Ahok, seorang beragama Kristen dan beretnis China, dengan rekam jejak politik yang tak kalah menariknya.<sup>9</sup> Kedatangannya di pasar-pasar tradisional selalu mendapatkan perhatian rakyat Jakarta. Pada periode pemerintahannya yang singkat, ia memperkenalkan pembaruan pelayanan dan administrasi di tingkat kelurahan. Untuk memperbaiki kualitas birokrasi, ia memelopori lelang jabatan, untuk mendapatkan sumberdaya pemimpin yang bisa melakukan perubahan besar, karena ia pesimis dengan kemampuan dan kepemimpinan dari stok pejabat yang ada. Gebrakan kebijakan yang lain adalah pembangunan Mass Transit Jakarta yang sudah lama digagas sejak era gubernur Sutiyoso, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, Penyelesaian Pembangunan Kanal Banjir Timur, penertiban kawasan Tanah Abang, dan bantuan untuk rakyat miskin dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, serta pembenahan dan penambahan koridor busway.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, lahir pada 29 Juni 1966, dan sebelum berkiprah di politik nasional pernah menjabat sebagai bupati Belitung Timur (2005). Pada 11 Desember 2006, ia mengundurkan diri dari jabatannya untuk ikut bertarung sebagai gubernur Bangka-Belitung tahun 2007, namun gagal. Politik nasionalnya dimulai dengan terpilih sebagai anggota DPR periode 2009-2012 melalui partai Golongan Karya, dan bergabung di komisi II.

<sup>10</sup> Janji lengkap program kerja Joko Widodo bisa dilihat di lampiran.

#### a. Jokowi dan Kontestasi Politik di Pilpres 2014

Meskipun Jokowi telah berhasil menduduki kursi gubernur DKI dan kini telah menjadi tokoh nasional yang banyak diperbincangkan, PDIP, sebagai partai tempat Jokowi ber-naung, tidak mudah memberikan dukungannya untuk maju sebagai calon presiden RI sebagaimana keraguannya untuk memberi dukungan saat Jokowi ingin maju sebagai calon gubernur DKI pada pilgub 2012. Padahal, berbagai lembaga survei aktif memublikasikan hasilnya yang menunjukkan dukungan rakyat yang tinggi jika Jokowi maju sebagai calon presiden. Dukungan itu baru diberikan di menit-menit akhir, setelah Jokowi, didukung oleh beberapa elite politik dan sukarelawan, mendekati ketua Umum Megawati Sukarno Putri, dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa sang gubernur bakal mampu mengalahkan lawannya di pilpres 2014.<sup>11</sup>

Jokowi maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla, seorang pengusaha, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kurun waktu 2004-2009. Dalam pencalonan tersebut, Jokowi-Kalla

<sup>11</sup> Lihat juga analisa dari Peter McCawly, *Jokowi's Indonesia Possible Paths*, diterbitkan oleh Australian Strategic Policy Institute, September 2014, h. 23.

didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan dan tiga partai lainnya, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Secara total, suara keempat partai itu dalam pemilu legislatif tahun 2014 mencapai 40%. Calon lain dalam pilpres 2014 adalah Prabowo Subianto, mantan patron Jokowi dalam pilgub DKI 2012, yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, ketua Umum Partai Amanat Nasional. Partai pendukung lainnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Secara total suara dukungan mereka di parlemen hasil pemilu 2014 adalah 32,72%. Belakangan, Partai Golongan Karya (Golkar) juga bergabung dengan koalisi ini. Satu-satunya partai yang tidak berpihak pada koalisi manapun adalah Partai Demokrat, yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, presiden saat itu.

Di parlemen, partai-partai yang mendukung presiden Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 orang), Partai Kebangkitan Bangsa (91 orang), Partai Nasional Demokrat (36 orang), Partai Hati Nurani Rakyat (orang) (16 orang) atau sekitar 208 dari 560 orang anggota keseluruhan, atau mewakili 36.46%. Kekuatan politik ini tentu saja kalah jauh jika dibandingkan dengan lawan mereka,

Koalisi Merah Putih pendukung pasangan Prabowo-Hatta, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera yang berjumlah 291/560 atau 51.9% kursi di DPR. Di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga belum secara solid mendukung presiden Jokowi. Para elite partai ini seperti berada pada persimpangan jalan antara mendukung presiden secara penuh dengan resiko Presiden Jokowi, yang bukan kader partai, bisa mengambil kendali atas partai ini, atau menjaga jarak dari presiden dengan resiko tidak bisa ikut menikmati kekuasaan. Fenomena persimpangan itu bisa dilihat dari ucapan salah satu tokoh partai, Puan Maharani, yang memandang Joko Widodo sebagai petugas partai, sehingga harus tunduk pada perintah Ketua Umum Megawati Sukarno Putri. Hal ini tentu saja juga bisa ditafsirkan bahwa hubungan Presiden Jokowi dan Megawati tidak selamanya harmonis.<sup>12</sup>

Pemilu presiden tahun 2014 hanya berlangsung selama satu kali

12 Jokowi: Saya Memang Petugas Partai... <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/25/1342220/Jokowi.Saya.Memang.Petugas.Partai>. Lihat juga Mega Tegaskan Status Presiden Jokowi Tetap Petugas Partai. Diakses 21 September 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150721180244-32-67479/mega-tegaskan-status-presiden-jokowi-tetap-petugas-partai>. Diakses 21 September 2019.

putaran. Berdasarkan penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum, pasangan nomor urut 2, yakni Jokowi-Kalla memperoleh suara sebanyak 70.997.833 atau 53,15% sedangkan lawannya, yakni pasangan nomor urut pertama, Prabowo-Hatta Rajasa, dipilih oleh sebanyak 62.576.444 atau 46,85%. Jumlah suara sah sebesar 133.574.277, sedangkan jumlah suara tidak sah 1.379.690. Dengan selisih suara sebanyak 8.421.389 dengan kemenangan tersebut, Jokowi-Kalla ditetapkan sebagai presiden 2014-2019.<sup>13</sup>

Sama seperti di pilgub DKI 2012, pada pemilihan presiden 2014 ini relawan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla juga tampak lebih bersemangat dan memiliki aktivitas yang lebih beragam dibandingkan dengan relawan pendukung pasangan Prabowo-Hatta, karena mereka dipicu oleh idealisme dan harapan untuk perubahan. Mereka aktif berkampanye bukan hanya dengan menyebar dan memasang atribut di berbagai tempat tetapi melakukan orasi dan menggalang massa melalui berbagai pos komando (posko), tersebar di dalam dan di luar negeri, dengan jumlah kira-kira mencapai

1289.<sup>14</sup> Mereka terbagi ke dalam dua kelompok, yakni relawan yang aktif di dunia maya dan relawan yang turun langsung ke lapangan. Mereka juga memiliki peran penting dalam mengawal suara yang diperoleh pasangan Jokowi-JK di kantong-kantong pemilih yang dianggap menjadi kekuatannya<sup>15</sup>

Pertarungan di pilpres 2014 juga tak luput dari pertarungan politik identitas sebagaimana pertarungan pada pilgub DKI 2012.<sup>16</sup> Penggunaan politik identitas ini diduga akibat pertarungan yang keras, karena prediksi jarak elektabilitas antara kedua pasangan kandidat yang dinilai tidak jauh sebagaimana disampaikan oleh berbagai survei. Kuskridho Ambardi, misalnya, menyebutkan bahwa jarak elektabilitas kedua pasangan sebelum hari pemilu hanya terpaut 12 persen. Penggunaan politik identitas ditempuh dalam kerangka menarik simpati dari pemilih di ceruk tersebut.<sup>17</sup>

13 "Perjalanan Panjang Jokowi ke Pintu Gerbang Istana", <https://www.medcom.id/pemilu/parpol-2014/aNreJogK-perjalanan-panjang-jokowi-ke-pintu-gerbang-istana>. Diakses 13 Agustus 2019.

14 Asep Setiawan, "Peran Relawan dalam Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014:", *Kajian Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 28, 2017, h. 13

15 Ibid., h 24.

16 "Identitas Jadi Komoditas Pada Pilpres 2014," <https://republika.co.id/berita/n66vcv/identitas-jadi-komoditas-pada-pilpres-2014>. Diakses 13 Agustus 2019.

17 "Pengamat: identitas jadi komoditas dalam pilpres 2014", <https://www.antaraneews.com/berita/436099/pengamat-identitas-jadi-komoditas-dalam-pilpres-2014>, diakses 13 Agustus 2019.

Ketika Jokowi bersama Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden-wakil presiden pada 20 Oktober 2014, publik Indonesia memiliki harapan yang tinggi padanya, karena ia adalah figur yang dianggap reformis, bebas korupsi, dan bagian dari generasi baru yang terbebas dari politik dinasti. Namun, di awal pemerintahannya, Jokowi tampak lemah dan kurang menunjukkan kemampuan memimpinya, sehingga belum bisa memenuhi harapan pada pendukungnya. Menurut Burhanuddin Muhtadi, ada beberapa alasan mengapa Jokowi tidak mampu memenuhi harapan publik tersebut, setidaknya untuk tahun pertama pemerintahannya. Pertama, Jokowi tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menghadapi persoalan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menempatkan prioritas di bidang ekonomi, Jokowi terlihat pragmatis dan berfokus pada urusan domestik. Tindakan tegas terhadap korupsi dianggapnya bisa mengurangi minat para investor untuk memulai bisnis di Indonesia. Semua ini meruntuhkan harapan bahwa Jokowi akan melakukan reformasi. Faktor lain adalah struktural, di mana Jokowi tidak bisa menghindarkan diri dari kekuatan oligarkis yang mendominasi kehidupan politik di Indonesia dan mencampurkan urusan kepentingan politik dengan bisnis. Ketika pemilu telah berakhir, kekuatan politik telah

berpindah dari tangan kelompok relawan dan massa pemilih ke tangan para elite. Dengan dukungan politik yang tidak cukup besar di parlemen, Jokowi tentu membutuhkan kekuatan oligarki untuk menguatkan otoritasnya.<sup>18</sup>

#### b. Jokowi dan Islam

Sejak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, banyak yang meragukan keislaman Jokowi. Meskipun fakta bahwa Jokowi adalah seorang Muslim namun banyak kelompok Islam yang belum bisa mengakui bahwa Jokowi adalah seorang Muslim sejati yang memiliki komitmen besar untuk menjalankan nilai-nilai Islam. Jokowi bahkan sering dikaitkan dengan ideologi komunisme dan PKI, yang merupakan ideologi terlarang di Indonesia.<sup>19</sup>

Keraguan terhadap identitas keislaman Jokowi itu didasarkan pada beberapa hal. Pertama, partai afiliasi Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Secara historis, PDI-P merupakan pecahan dari Partai Demokrasi Indonesia, yang dibentuk oleh pemerintahan Orde Baru untuk menyederhanakan sistem kepartaian

18 Burhanuddin Muhtadi, "Jokowi's First Year: A Weak President Caught Between Reform and Oligarchic Politics," dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 3, 2015: 349-68

19 Lihat Empat Tahun Diam, Jokowi akan Bantah Isu Dirinya PKI <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190109171750-32-359658/empat-tahun-diam-jokowi-akan-bantah-isu-dirinya-pki>

di Indonesia. PDI adalah gabungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Dengan komposisi partai seperti itu, maka tak mengherankan bila pengurus dan anggota simpatisan partai ini beragam, dan bahkan pada pos-pos penting kepartaian diisi oleh nonmuslim.<sup>20</sup> Kedua, dalam berbagai kesempatan, Jokowi dinilai kurang fasih dan benar dalam menjalankan praktek keislaman, sebagai misal, Jokowi dianggap salah dalam melaksanakan aturan berwudlu. Diceritakan bahwa mantan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan telah mengingatkan cara berwudlu Jokowi yang salah tersebut, namun sang gubernur justru marah dengan cara mengingatkannya tersebut.<sup>21</sup> Pendapat lain juga menyoroti cara shalat Jokowi yang dianggap kurang sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, ketika pada shalat Maghrib di sebuah masjid perkampungan, Jokowi diminta untuk memimpin shalat tersebut. Dengan memakai kopyah, celana dan baju lengan

panjang, serta surban di lehernya, Jokowi menjadi imam shalat. Para audien menyoroti bacaan surat al-fatihah yang dianggap tidak sempurna, terutama pada ketika membaca ayat ke 7 "shiro tolladzina amta 'alaih" seharusnya "shiro toladzina an' amta 'alaih".<sup>22</sup>

Keraguan terhadap keislaman Jokowi kemungkinan telah dimulai sejak Jokowi menjabat sebagai wali kota Surakarta. Pada saat tersebut, ia menjadi walikota berpasangan dengan seorang Kristen, yakni FX Rudyatmo. Misalnya, sewaktu mempersiapkan mobil ESEMKA untuk melakukan uji emisi di Jakarta, Jokowi menyiramkan air kembang sebagai doa untuk keselamatan. Sehari menjelang keberangkatan mobil Esemka ke Balai Thermodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) Serpong, Tangerang, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menggelar Wilujengan dan Jamasan Mobil Esemka, disertai dengan satu set tumpeng lengkap yang berisi nasi gurih, ingkung, sambel goreng ati, dan kedelai hitam. Jokowi sendiri menggelar upara selamat tersebut sambil mengenakan baju adat Jawa, yakni baju beskap khas solo. Bahkan keberangkatan mereka juga dilepaskan dengan tarian 45 buto (raksasa) dalam fragmen cerita rakyat. Dalam fragmen kusumo yudho ter-

20 Misalnya, Hasto Kristiyanto, seorang Katolik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memegang jabatan sekretaris jenderal sejak tahun 2014.

21 Dari Akun Twitter Ragil Nugroho: 'Diingatkan Salah Wudhunya, Jokowi Tak Terima' <https://www.salam-online.com/2014/05/dari-akun-twitter-ragil-nugroho-diingatkan-salah-wudhu-jokowi-marahi-mantan-sekda-dki.html>

22 Jokowi Imam Shalat Bacaan Al Fatihah Kurang Lengkap [https://www.youtube.com/watch?v=dpmXZ\\_-3Hxk](https://www.youtube.com/watch?v=dpmXZ_-3Hxk)

sebut juga akan ditampilkan 4 orang yang menggambarkan tokoh Gatotkaca dan 4 orang tokoh Abimanyu, yang keduanya merupakan tokoh kesatria pembela kebenaran dari keluarga Pandawa di cerita pewayangan.<sup>23</sup> Oleh kelompok Islam tertentu, praktek seperti ini bisa dianggap syirik, karena tidak diajarkan oleh AL-Quran dan Hadis sebagai cara untuk mendapatkan keselamatan. Di sisi lain, Jokowi berkilah bahwa praktek tersebut dilakukan sebagai bagian dari budaya leluhur.<sup>24</sup>

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga senantiasa dibayang-bayangi stigma anti Islam, baik karena perilaku dan pengetahuan agamanya yang kurang mendalam atau karena kebijakan-kebijakannya. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah keputusannya untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas.<sup>25</sup> Pemerintahan Jokowi

membubarkan organisasi ini karena organisasi dianggap memiliki ideologi untuk mendirikan khilafah di Indonesia, yang bertentangan dengan Pancasila, meskipun mendapatkan reaksi dari banyak kelompok umat Islam.<sup>26</sup> Lebih jelas, Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, menyatakan bahwa pemerintah membubarkan HTI karena tiga pertimbangan, yakni:

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.<sup>27</sup>

23 Mobil Esemka Diguyur Air Kembang Tujuh Rupa Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mobil Esemka Diguyur Air Kembang Tujuh Rupa", <https://regional.kompas.com/read/2012/02/24/05162738/Mobil.Esemka.Diguyur.Air.Kembang.Tujuh.Rupa>.

<https://regional.kompas.com/read/2012/02/24/05162738/Mobil.Esemka.Diguyur.Air.Kembang.Tujuh.Rupa>

24 Jokowi Pilih Islam atau Kemusyrikan? <https://www.nahimunkar.org/jokowi-pilih-islam-atau-kemusyrikan/>

25 "Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan Ormas", <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormas>. Diakses 21 September 2019.

26 Ribuan Umat Islam Demo Tolak Perpu Ormas dan Kebangkitan PKI, <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-umat-islam-demo-tolak-perpu-ormas-dan-kebangkitan-pki-/4050766.html>. Diakses 21 September 2019.

27 "Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia?page=all>. Diakses 21 September 2019.

Salah satu tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, Felix Siauw, menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi dinilai anti Islam karena beberapa hal seperti pembiaran Jokowi terhadap kepolisian yang menuding makar kepada Aksi Bela Islam yang ingin mempersoalkan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dianggap telah menistakan agama, dan kebijakan pemerintah yang mengkriminalisasi ulama (misalnya pelarangan pulang Habib Rizieq Shihab), dan perlakuan Jokowi yang mengistimewakan pada pelaku pembakaran masjid dengan mengundangnya ke istana, pembubaran masjid tanpa alasan yang jelas. "Nah jangan-jangan wajar ketika orang merasa bahwa ini adalah penguasa yang anti-Islam," ujar Felix dalam video yang diunggah di akun Facebook, Senin, 9 Mei 2017.<sup>28</sup>

## KESIMPULAN

Dengan memperhatikan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa Kemunculan Jokowi di tingkat nasional merupakan sebuah fenomena yang tak biasanya. Hal tersebut mengingat latar belakang Jokowi yang tidak berasal dari elite politik, social dan militer Indonesia. Kehadiran Jokowi, oleh

karena itu, memberi harapan banyak pada mereka yang memimpin seorang pemimpin politik yang lebih berpihak kepada rakyat. Apalagi, gaya penampilan Jokowi yang sederhana seperti ditunjukkan dengan gaya pakaian dan kebiasaannya untuk blusukan menemui langsung rakyat telah memberi warna tersendiri dalam langkah politik Jokowi. Namun, Jokowi bukan tanpa kendala. Dengan kehadirannya sebagai pemimpin nasional baru di tengah rimba Jakarta, tak banyak hal yang bisa ia lakukan jika ia tak mampu berkompromi dengan kekuatan ekonomi dan politik yang telah mapan sebelumnya. Dari sinilah kredibilitas Jokowi sebagai pemimpin politik mulai diragukan. Apalagi, kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya sebagian besar terdiri dari para relawan dan kelompok lembaga social masyarakat yang secara politik praktis tidak memiliki kekuatan di parlemen. Kekuatan mereka adalah kekuatan moral. Di sisi lain, keraguan pada Jokowi juga berasal dari latar belakang social dan politiknya, di mana Jokowi dianggap dianggap sebagai masyarakat kelas bawah yang abangan, dan didukung oleh partai PDIP yang juga dikenal sebagai politiknya kelompok abangan dan Kristen.

28 Ustaz Felix Siauw Ungkap Indikasi Pemerintahan Jokowi Anti-Islam, <https://nasional.sindonews.com/read/1203662/12/ustaz-felix-siauw-ungkap-indikasi-pemerintahan-jokowi-anti-islam-1494296485>. Diakses 21 September 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin Muhtadi, 2015. "Jokowi's First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics," dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 3, 2015.
- Ediraras, Dharma Tintri, 2012. "Political Marketing Strategy of Jakarta Governor Election in The 2012s," dalam *Procedia-Social and Behavioral Sciences*.
- Hamid, Abdul, 2014. Jokowi's Populism in the 2012 Jakarta Gubernatorial Election, dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1, 85-109.
- McCawly, Peter, 2014. *Jokowi's Indonesia Possible Paths*, Australian Strategic Policy Institute, September 2014.
- Miichi, Ken, 2014. "The Role of Religion and Ethnicity in Jakarta's 2012 Gubernatorial Election", dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1.
- Setiawan, Asep, 2017. "Peran Relawan dalam Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014, *Kajian Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 28, 1.
- Susanto, Eko Harry, 2017. "Jokowi's Political Communication in Jakarta Governor Election to Win Age-Based Voters," *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Januari.

## Sumber Online

- "Sejarah Polemik Jokowi vs Bibit Waluyo" <https://tirto.id/sejarah-polemik-jokowi-vs-bibit-waluyo-yang-diklaim-dukung-prabowo-dgoX>. Diakses 7 Agustus 2019.
- "Hashim Sebut Megawati Sempat Ogah Sama Jokowi buat Pilgub DKI," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190122080050-32-362692/hashim-sebut-megawati-sempat-ogah-sama-jokowi-buat-pilgub-dki>, diakses 13 Agustus 2019.
- "Jokowi Akui Prabowo Berperan Menjadikannya Gubernur DKI, tetapi...", <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/27/1918260/Jokowi.Akui.Prabowo.Berperan.Menjadikannya.Gubernur.DKI.tetapi>.
- "Jokowi: Saya Memang Petugas Partai..." <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/25/1342220/Jokowi.Saya.Memang.Petugas.partai>.
- "Mega Tegaskan Status Presiden Jokowi Tetap Petugas Partai". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150721180244-32-67479/mega-tegaskan-status-presiden-jokowi-tetap-petugas-partai>. Diakses 21 September 2019.
- "Perjalanan Panjang Jokowi ke Pintu Gerbang Istana", <https://www.medcom.id/pemilu/parpol-2014/aNreJogK-perjalanan-panjang-jokowi-ke-pintu-gerbang-istana>. Diakses 13 Agustus 2019.

- "Identitas Jadi Komoditas Pada Pilpres 2014," <https://republika.co.id/berita/n66vcv/identitas-jadi-komoditas-pada-pilpres-2014>. Diakses 13 Agustus 2019.
- "Pengamat: identitas jadi komoditas dalam pilpres 2014", <https://www.antaraneews.com/berita/436099/pengamat-identitas-jadi-komoditas-dalam-pilpres-2014>, diakses 13 Agustus 2019.
- "Empat Tahun Diam, Jokowi akan Bantah Isu Dirinya PKI" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190109171750-32-359658/empat-tahun-diam-jokowi-akan-bantah-isu-dirinya-pki>
- 'Diingatkan Salah Wudhunya, Jokowi Tak Terima' <https://www.salam-online.com/2014/05/dari-akun-twitter-ragil-nugroho-diingatkan-salah-wudhu-jokowi-marahi-mantan-sekda-dki.html>
- "Jokowi Imam Shalat Bacaan Al Fatihah Kurang Lengkap" [https://www.youtube.com/watch?v=dpmXZ\\_-3Hxk](https://www.youtube.com/watch?v=dpmXZ_-3Hxk)
- "Mobil Esemka Diguyur Air Kembang Tujuh Rupa", <https://regional.kompas.com/read/2012/02/24/05162738/Mobil.Esemka.Diguyur.Air.Kembang.Tujuh.Rupa>. <https://regional.kompas.com/read/2012/02/24/05162738/Mobil.Esemka.Diguyur.Air.Kembang.Tujuh.Rupa>
- "Jokowi Pilih Islam atau Kemusyrikan?" <https://www.nahimunkar.org/jokowi-pilih-islam-atau-kemusyrikan/>
- "Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan Ormas", <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormas>. Diakses 21 September 2019.
- Ribuan Umat Islam Demo Tolak Perpu Ormas dan Kebangkitan PKI, <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-umat-islam-demo-tolak-perpu-ormas-dan-kebangkitan-pki-/4050766.html>. Diakses 21 September 2019.
- "Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia?page=all>. Diakses 21 September 2019.
- "Ustaz Felix Siauw Ungkap Indikasi Pemerintahan Jokowi Anti-Islam", <https://nasional.sindonews.com/read/1203662/12/ustaz-felix-siauw-ungkap-indikasi-pemerintahan-jokowi-anti-islam-1494296485>. Diakses 21 September 2019.
- "Lihat Jokowi Kenang Ibadah Haji 15 Tahun Lalu Bareng Istri," <https://news.detik.com/berita/d-4158119/jokowi-kenang-ibadah-haji-15-tahun-lalu-bareng-istri>